



**BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 48 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing-masing;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 5);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor : 2 Seri : E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
2. Bupati adalah Bupati Karawang;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah;

5. Kinerja organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusa yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Bappeda adalah OPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Karawang;
8. Kepala Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Karawang untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada pembangunan jangka panjang nasional;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan daerah Kabupaten Karawang untuk periode 5 (lima) terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Karawang untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
16. Tujuan dan sasaran adalah arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misi;
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;

18. Arah kebijakan strategis adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu;
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program;
21. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
22. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh;
23. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Karawang :

- (1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- (2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## **BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA**

### **Pasal 3**

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja Utama Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

#### **Pasal 4**

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk :

- a. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja);
- c. Penyusunan Rencana Anggaran Program dan Kegiatan;
- d. Penyusunan dokumen Perjanjian kinerja;
- e. Penyusunan Pelaporan akuntabilitas kinerja; dan
- f. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.

### **BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan hasil penyelarasan RPJMD mengacu pada regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

### **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 6**

Pimpinan Perangkat Daerah melakukan :

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang dan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang; dan
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **7 Desember 2021**

  
BUPATI KARAWANG,  
  
CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **7 Desember 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACER JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021  
NOMOR **48**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 48 TAHUN 2021  
 TENTANG PENETAPAN IKU DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN KARAWANG

**Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karawang**

Nomor	MISI	TUJUAN	SASARAN	IKU	Definisi Operasional	Satuan	Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Terwujudnya Sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berkarakter	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan dan literasi	Indeks Pendidikan	Perhitungan dari rata rata lama sekolah dengan harapan lama sekolah	Indeks	Pendidikan, Perpustakaan, Pemuda dan Olahraga
			Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan	Indeks Kesehatan	Perhitungan dari usia harapan hidup	Indeks	Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender.  IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan	Indeks	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Meningkatnya kesejahteraan dan jaminan perlindungan masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat serta pemberian jaminan dan perlindungan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	%	Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Indeks <i>Purchasing Power Parity</i> (PPP)	Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.	Indek	Koperasi UMKM, Sosial

Nomor	MISI	TUJUAN	SASARAN	IKU	Definisi Operasional	Satuan	Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil		
2.	Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang kreatif, produktif dan berdaya saing serta berbasis pada potensi lokal	Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang kreatif, inovatif dan berbasis pada potensi unggulan daerah	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Pertumbuhan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB	Pertumbuhan kontribusi pertanian kehutanan dan perikanan dalam PDRB atas harga konstan tahun n - tahun n- 1 dibagi tahun n-1	%	Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan
Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul dan pengembangan ekonomi kreatif			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah pendapatan pariwisata (pajak dan retribusi) dibandingkan dengan total pendapatan asli daerah	%	Pariwisata, Koperasi UMKM, Kebudayaan, Perdagangan	
Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi			Pertumbuhan kontribusi industri pengolahan dalam PDRB	Pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB atas harga konstan tahun n - tahun n- 1 dibagi tahun n-1	%	Perindustrian, Penanaman Modal	
3.	Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang aman, nyaman dan mendukung proses pembangunan yang berkesinambungan	Terwujudnya prinsip pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berkesinambungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Karawang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks pembangunan lingkungan yang dihitung dari indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks	Lingkungan Hidup
				Indeks Resiko Bencana	Resiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana	Indeks	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Nomor	MISI	TUJUAN	SASARAN	IKU	Definisi Operasional	Satuan	Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Menurunnya kesenjangan antar wilayah khususnya dalam ketersediaan sarana dan prasarana	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Rasio konektivitas	Aksesibilitas didefinisikan sebagai ukuran kapasitas lokasi yang akan dicapai dengan, atau untuk mencapai lokasi yang berbeda	Rasio	Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Tercapainya universal akses (kumuh, air bersih, pengelolaan sampah dan limbah domestik)	Capaian universal akses	Rata rata capaian dari akses air minum, sanitasi dan kumuh	%	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, koordinatif dan akuntabel serta berorientasi kebutuhan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan kapabel	Nilai SAKIP	Evaluasi oleh Kemen PAN-RB berdasarkan: upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, Pedoman akuntabilitas kinerja yang telah disusun, Pemutakhiran data kinerja yang dilakukan secara berkala	indeks	Unsur Penunjang Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, Setda, Setwan, Pengawasan Kepegawaian
				Opini audit (Opini BPK)	Diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.	Opini	Keuangan dan pengawasan
			Terwujudnya implementasi teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan bagi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan dari beberapa Perangkat Daerah	Nilai	Penanaman Modal, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Unsur penunjang pemerintahan, unsur kewilayahan (Kecamatan)
				Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks komposit SPBE berdasarkan: Kepemilikan Arsitektur SPBE, Kepemilikan Peta Rencana SPBE, pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE, penerapan	Indeks	Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kearsipan

Nomor	MISI	TUJUAN	SASARAN	IKU	Definisi Operasional	Satuan	Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Manajemen Layanan SPBE, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik, Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Publik Berbasis Elektronik.		
			Terwujudnya ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kasus tahun n – kasus tabun n-1 dikali 100%	%	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesbangpol


 BUPATI KARAWANG,  
 CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 48 TAHUN 2021  
 TENTANG PENETAPAN IKU DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN KARAWANG

**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Karawang  
 Tahun 2021-2026**

**I. SEKRETARIAT DAERAH**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan kapabel	Meningkatnya Kualitas Laporan Pembangunan Daerah	SKOR LPPD Kabupaten	$\text{Nilai LPPD} = \text{Penilaian Kemendagri}$	Sekretariat Daerah	
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Barang/Jasa serta Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase kinerja pengelolaan barang/jasa dan Opini Audit BUMD	$\text{Realisasi Layanan Barjas} = \frac{\text{Implementasi } \Sigma \text{ paket pengadaan}}{\Sigma \text{ Rencana Pengadaan}} \times 100\%$	Sekretariat Daerah	
				$\text{Realisasi Opini Audit} = \frac{\Sigma \text{ BUMD WTP}}{\Sigma \text{ BUMD}} \times 100\%$		
		Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai Akip SETDA	Tingkat AKIP Setda -Laporan Hasil Evaluasi INSPEKTORAT	Sekretariat Daerah	

## II. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan kapabel	Perencanaan Pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis dan kredibel	1. Persentase (%) Keselarasan muatan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RKPD Tahun (n), terdiri atas :	<p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dimana Indeks Perencanaan menjadi salah satu indikator level mikro Reformasi Birokrasi 2020-2024 pada Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas. Indeks Perencanaan Pembangunan ini akan berimplikasi pada menguatnya peran Bappeda Kabupaten Karawang, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengukur kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah Kabupaten Karawang (Tiap Prioritas Daerah (PD))</li> <li>2. Dapat mengukur kualitas perencanaan perangkat daerah dengan kategori, sangat baik, baik, cukup dan kurang</li> <li>3. Indeks ini akan menjadi bagian dari penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB</li> <li>4. Cascading IKU akan menjadi alat ukur kinerja individu/tiap pegawai di Bappeda Kab. Karawang</li> </ol>		
			a) Persentase (%) keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD Lingkup Bidang Pemkesos (Prioritas Daerah/PD)		Bidang Pemkesos	
			b) Persentase (%) keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD Lingkup Bidang Ekonomi (Prioritas Daerah/PD)		Bidang Ekonomi	
			c) Persentase (%) keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD Lingkup Bidang Prasarana dan Tata Ruang (Prioritas Daerah/PD)		Bidang Prasarana dan Tata Ruang	
			2. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah	Definisi Operasional : Rekomendasi merupakan hasil dari pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD Tahun (n), yang harus ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah pada tahun (n). Rekomendasi dianggap ditindaklanjuti jika perangkat daerah telah melakukan rekomendasi tersebut. Keberhasilan/kegagalan dari pelaksanaan rekomendasi tersebut tidak menjadi bagian yang diukur dalam indikator ini	Bidang Pembiayaan Monitoring dan Evaluasi	

### III. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan kapabel	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel	1. Persentase Pengelolan Keuangan Daerah	(Persentase kesesuaian dokumen penganggaran + Persentase Penetapan APBD tepat waktu + Presentase pemenuhan <i>Mandatory Spending</i> sesuai dengan Perundang- undangan + Persentase Tertib administrasi penatausahaan keuangan + Persentase kesesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerijtah) dibagi 5	BPKAD	
			2. Persentase Pengelolan Aset Daerah	(Persentase tertib penatausahaan Barang Milik Daerah + Persentase pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BPKAD) dibagi 2	BPKAD	

### IV. BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan kapabel	Meningkatkan Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD	Persentase (%) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$\frac{(\text{Jumlah PAD Tahun } n) - (\text{Jumlah PAD Tahun } n-1)}{\text{Jumlah PAD Tahun } n-1} \times 100\%$	Badan Pendapatan. Daerah	
			Persentase (%) Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$\frac{\text{Jumlah Pajak Daerah Tahun } n}{\text{Jumlah PAD Tahun } n} \times 100 \%$	Badan Pendapatan. Daerah	

## V. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA (BKPSDM)

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan akuntabel dan kapabel	Meningkatkan standar penerapan sistem merit	Nilai Sistem Merit Hasil Penilaian Mandiri	Peraturan KASN no. 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. Jumlah capaian nilai merit system hasil penilaian Mandiri (aplikasi SIPINTER)	BKPSDM Kabupaten Karawang	

## VI. INSPEKTORAT

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan kapabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD rata-rata pertahun	$\frac{\text{Jumlah akumulasi Nilai AKIP OPD}}{\text{Jumlah OPD}}$	Inspektorat	

## VII. SEKRETARIAT DPRD

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan kapabel	Meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase memfasilitasi Raperda Kabupaten Karawang	$(\text{Realisasi Raperda} / \text{Target Raperda}) \times 100\%$	Sekretariat DPRD	

### VIII. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan dan literasi	Terpenuhinya pelayanan dasar pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP dan kesetaraan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		Meningkatnya peran dan fungsi pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	{Jumlah Pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kab/Kota} / {Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kab/Kota} x 100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		Meningkatnya peran dan fungsi olahraga	Cakupan pembinaan olahraga	Jumlah cabang olahraga yang dibina dibagi Total jumlah cabang olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

### IX. DINAS KESEHATAN

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Angka Kesakitan	$\frac{\text{Jumlah kunjungan kasus baru}}{\text{Jumlah penduduk pada suatu wilayah dan periode waktu tertentu}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	
			Rasio Kematian Ibu	$\frac{\text{Jumlah kematian ibu (hamil, bersalin, nifas 42 hari) pada kurun waktu tertentu}}{\text{jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$	Dinas Kesehatan	
			Rasio kematian bayi	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi usia 0-1 tahun di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 1.000$	Dinas Kesehatan	
			Persentase Angka Stunting	$\frac{\text{Jumlah balita 0-59 bulan dengan status pendek di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah balita 0-59 bulan yang diukur tinggi badan pada wilayah dan kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	

**X. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Meningkatnya pengelolaan Sumberdaya Air dan pengelolaan sistem irigasi primer serta sekunder pada daerah irigasi dibawah 1000 Ha	Rasio luas daerah irigasi kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas daerah irigasi Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), di rehabilitasi (ha) di operasi dan dipelihara (ha) di tahun eksisting / Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten x 100	Dinas PUPR	
		Meningkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan	Prosentase jalan dalam kondisi baik	panjang jalan dalam kondisi baik/ total panjang jalan kabupaten x 100	Dinas PUPR	
			Prosentase Jembatan dalam kondisi baik	Jumlah Jembatan dalam kondisi baik/total jumlah jembatan kabupaten x 100	Dinas PUPR	
		Meningkatnya kinerja sistem drainase perkotaan	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Panjang drainase perkotaan tidak tersumbat pembuangan aliran air (Km) dibagi Panjang seluruh drainase perkotaan kewenangan kabupaten (Km) X 100	Dinas PUPR	
		Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Nilai/ Score SIPJAKI	Nilai layanan informasi jasa konstruksi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Dinas PUPR	
		Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang	Jumlah pola ruang dan struktur ruang yang pemanfaatannya sesuai RTRW / Jumlah pola ruang dan struktur ruang sesuai RTRW x 100	Dinas PUPR	
Meningkatnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio Kepatuhan IMB	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya / Jumlah IMB yang berlaku x 100	Dinas PUPR			

## XI. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1	Tercapainya universal akses (kumuh, air bersih, pengelolaan sampah dan limbah domestik)	Meningkatnya pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau bagi masyarakat	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki dibagi target jumlah penanganan rumah tidak layak huni X 100	Dinas PRKP	
		Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	Kumuh yang ditangani dibagi jumlah luasan total kawasan kumuh di Kabupaten Karawang (SK Bupati) x 100	Dinas PRKP	
			Persentase Pembangunan Rumah Korban Bencana	Jumlah pembangunan rumah korban bencana dibagi jumlah total terkena bencana x 100	Dinas PRKP	
			Persentase Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU dibagi Jumlah Total unit rumah di Kabupaten x 100	Dinas PRKP	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bersih sehari-hari bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air bersih	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih melalui SPAM jaringan perpipaan + Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air bersih melalui SPAM Non Perpipaan dibagi jumlah rumah tangga X 100	Dinas PRKP	
		Meningkatnya penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang memperoleh pelayanan air limbah melalui layanan SPALD	Jumlah rumah tangga yang memperoleh pelayanan air limbah melalui layanan SPALD-S + SPALD-T / Jumlah Rumah di Kabupaten x 100	Dinas PRKP	
Meningkatnya tertib administrasi aset pemda yang berasal dari pengembang perumahan dan pengadaan tanah	Persentase peningkatan jumlah penyerahan kewajiban pengembang Perumahan menjadi aset pemda dan pengadaan tanah milik Pemda	((Jumlah PSU yang diserahkan dibagi jumlah Perumahan di Kab. Karawang) + (jumlah TPU yang diserahkan dibagi jumlah perumahan yang sedang berproses perizinan) + (jumlah pengadaan tanah pemda di bagi target pengadaan tanah tahun n) x 100	Dinas PRKP			

## XII. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Karawang	Persentase Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	((Jumlah kasus tahun (n-1) - jumlah kasus tahun (n)) / Jumlah kasus tahun (n) X 100  Sumber : Rekap data pelanggaran Perda dan Perkada	Satpol PP	

**XIII. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pendidikan politik berwawasan kebangsaan guna mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik berwawasan kebangsaan per tahun	Akumulasi penambahan masyarakat yang dibina setiap tahun	Kesbangpol	

**XIV. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Karawang	Meningkatnya penerapan standarisasi dan mekanisme, masyarakat sadar bencana serta terlaksanakannya penanganan bencana yang sinergis dan terintegrasi	Persentase Penanganan Bencana sesuai Standar Pelayanan Minimal Urusan Bencana	(Prosentase Peningkatan Kemampuan tentang Kebencanaan di Daerah Rawa Bencana + Prosentase Penanganan Kejadian Bencana + Prosentasi Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi)/3) x 100%	BPBD	
		Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	(Jumlah layanan pemadamam, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota/Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota) x 100%	BPBD	

**XV. DINAS SOSIAL**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat serta pemberian jaminan dan perlindungan sosial	Meningkatnya akses pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS dengan tingkat kesejahteraan level 1 dan 2 (desil 1 dan desil 2)	Persentase PPKS desil 1 dan desil 2 yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial	Formula : Jumlah PPKS yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial dibagi jumlah PPKS keseluruhan dikali 100%  Sumber : Peraturan Menteri Sosial Nomor 111/Huk/2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024	Dinas Sosial	

**XVI. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender dan Kualitas Perempuan	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) Pada belanja langsung APBD	(Jumlah ARG pada belanja langsung APBD)/(jumlah seluruh anggaran belanja langsung di kabupaten) x 100	DP3A	
		Terwujudnya kota layak anak	Persentase komponen nilai indikator KLA yang terpenuhi	Jumlah nilai evaluasi KLA yang diperoleh / Jumlah total komponen nilai KLA x 100	DP3A	
		Optimalnya pencegahan dan penanganan terhadap Perempuan Dan Anak korban kekerasan termasuk TPPO	Rasio perempuan korban kekerasan dan TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	(Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan)/(Jumlah penduduk perempuan) x 100.000	DP3A	
			Presentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten/ Kota (Penduduk usia kurang dari 18 tahun )	( Jumlah Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten/Kota yang didampingi)/(Jumlah anak) x 100	DP3A	

**XVII. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat serta pemberian jaminan dan perlindungan sosial	Meningkatnya capaian kinerja ketenagakerjaan	Indeks ketenagakerjaan	Persentase Rata-rata capaian program pelatihan, penempatan dan hubungan industrial	Disnaker	

**XVIII. DINAS PANGAN**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Meningkatnya ketersediaan pangan dan konsumsi pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	jumlah cadangan pangan x 100 / kebutuhan pangan	Dinas Pangan	

**XIX. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Karawang	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tanah/Lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$ <p>IPj = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j            Ci = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran)            Lij = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j            M = maksimum, A = average (rata-rata)</p>	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$ <p>I<sub>eu</sub> = 50% Indeks SO<sub>2</sub> + 50% Indeks NO<sub>2</sub></p>	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	$IKL = 100 - \left( 84,3 - \left( \frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}$ <p>DKK = ∑ Rumus W di Tutupan Hutan + Rumus W di Tutupan Belukar</p>	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	Meningkatnya Cakupan Pengelolaan dan Penanganan Persampahan Perkotaan	Persentase Timbulan Sampah di Perkotaan yang Tertangani dengan Baik	Volume timbulan sampah diperkotaan yang ditangani/ total timbulan sampah diperkotaan X 100%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		

**XX. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Terwujudnya implementasi teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan bagi masyarakat	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kependudukan	Persentase cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK)	(Jumlah KK yang diterbitkan pada tahun (x))/jumlah Kepala Keluarga dalam satu wilayah pada tahun (x) x 100 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Persentase Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	(jumlah KTPel yang diterbitkan pada tahun (x))/jumlah penduduk wajib KTP pada tahun (x) x 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Meningkatnya kinerja pelayanan pencatatan sipil	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran	(jumlah kepemilikan akta kelahiran s.d. tahun berjalan (x))/jumlah penduduk tahun berjalan (x) x 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

**XXI. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat serta pemberian jaminan dan perlindungan sosial	Meningkatnya Status Desa yang berdaya saing (kelembagaan, aparatur serta perekonomian desa)	Persentase peningkatan status Desa Mandiri	Indeks Desa Membangun (IDM) Kemendes = Jumlah Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri Tahun - N dikali 100% (Tahun 2020 4 Desa Mandiri)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Indeks Desa Membangun (IDM) Kemendes = Jumlah Persentase Pengentasan Status Desa Tertinggal Tahun - N dikali 100% (Tahun 2020 24 Desa Tertinggal)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

## XXII. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan	Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	$r = \left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{\frac{1}{t}} - 1$	DPPKB	
		Menurunkan angka kelahiran pada PUS	Angka Kelahiran Total ( TFR ) per WUS Usia 15 - 49 Tahun	$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ ASFR <sub>i</sub> : ASFR untuk wanita pada kelompo usia ke-i i = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49	DPPKB	
		Pendewasaan Usia Perkawinan	Median Usia Kawin Pertama Wanita	Rata-rata Wanita kawin pertama	DPPKB	

## XXIII. DINAS PERHUBUNGAN

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Meningkatnya kuantitas prasarana perhubungan	Persentase peningkatan prasarana perhubungan	Jumlah prasarana perhubungan yang terpasang di tahun (n) dibagi jumlah prasarana perhubungan yang terpasang di tahun (n-1)	Dinas Perhubungan	
			Rasio konektivitas kabupaten / kota	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Dinas Perhubungan	
			V/C Rasio di Jalan Kabupaten	VCR = V/C Keterangan : VCR = Volume Kapasitas Rasio V = Volume Lalu Lintas C = Kapasitas Ruas Jalan	Dinas Perhubungan	

**XXIV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1	Terwujudnya implementasi teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan bagi masyarakat	Meningkatnya Prosentase Penyelenggaraan SPBE di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang	Prosentase Penyelenggaraan SPBE di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang	Prosentase Perangkat Daerah yang sudah menyelenggarakan SPBE meliputi Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Meningkatnya Pelayanan Informasi Publik kepada Masyarakat	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Penilaian dari Komisi Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Keamanan Informasi	Indeks KAMI pada Instrumen Penilaian BSSN	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satu Data	Prosentase Statistik Sektoral yang diterbitkan	(Data Statistik Sektoral yang dipublikasikan / Data Statistik Sektoral) x 100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	

**XXV. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat serta pemberian jaminan dan perlindungan sosial	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan, pemberdayaan, Pengembangan dan perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang berkualitas	Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset dibagi jumlah seluruh koperasi aktif tahun (n) di kali 100 %	Dinas Koperasi UKM	
2	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul dan pengembangan ekonomi kreatif	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro	Persentase Usaha mikro Menjadi Usaha Kecil (naik Kelas)	Jumlah Usaha Mikro yang dibina dibagi Jumlah Wirausaha yang ada tahun (n) dikali 100 %	Dinas Koperasi UKM	

**XXVI. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Terwujudnya implementasi teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan bagi masyarakat	Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi	Jumlah investasi tahun n di Kabupaten Karawang	DPMPSTP	
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan perangkat daerah	DPMPSTP	

**XXVII. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul dan pengembangan ekonomi kreatif	Meningkatkan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi Kabupaten Karawang	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Kabupaten Karawang	Jumlah realisasi kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara pada tahun (n) / Jumlah target kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara pada tahun (n)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek pemajuan kebudayaan	Persentase unsur pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	Jumlah realisasi kebudayaan yang dikembangkan tahun (n) / Jumlah target kebudayaan dikembangkan tahun (n)  Keterangan : 1. Jumlah usulan warisan budaya tak benda Kabupaten yang ditetapkan sebagai WBTB Provinsi 2. Jumlah unsur pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

**XXVIII. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan dan literasi	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan dan literasi	Rasio Perpustakaan Persatuan penduduk (PMDN 18 2020)	jumlah perpustakaan di bagi jumlah penduduk dikali 1000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (PMDN 18 2020)	jumlah perpustakaan yang sesuai SNP di bagi jumlah perpustakaan di kali 100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	Terwujudnya implementasi teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan bagi masyarakat	Terwujudnya implementasi teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan bagi masyarakat	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yg sah dan pertanggungjawaban nasional (PMND 18 2020)	$T = ( a + I + s + j ) : 4$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemetintah, pelayan publik dan kesejahteraan daerah	$T=(m+b+g+a+c+i):6$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

**XXIX. DINAS PERTANIAN**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan (padi, kedelai), hortikultura (jamur merang), perkebunan (kopi)	Persentase Peningkatan Produktivitas Padi, Kedelai, jamur Merang dan Kopi	(Persentase Peningkatan Produktivitas Padi + Persentase Peningkatan Produktivitas Kedelai + Persentase Peningkatan Produktivitas Jamur Merang + Persentase Peningkatan Produktivitas Kopi )dibagi 4	Dinas Pertanian	
		Meningkatnya populasi ternak	Persentase Peningkatan Populasi ternak	Persentase Peningkatan Populasi Ternak = persentase Peningkatan Populasi Ternak Besar + Persentase Peningkatan Populasi Ternak Kecil+ Persentase Peningkatan Populasi Ternak Unggas	Dinas Pertanian	

### XXX. DINAS PERIKANAN

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Meningkatnya Produksi perikanan tangkap dan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya (Ton)	<p><b>P = PT + PB</b></p> <p>P = Jumlah Produksi Perikanan (Ton)                      PT = Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)                      PB = Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)</p> <p><u>Sumber :</u>                      Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan</p>	Dinas Perikanan	
		Meningkatnya produksi pengolahan hasil perikanan skala mikro dan kecil	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (Ton) meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- pemindangan (jenis produksi ikan pindang)</li> <li>- penggaraman/pengeringan (jenis produksi ikan asin)</li> <li>- fermentasi (jenis produksi terasi)</li> <li>- pelumatan daging (jenis produksi otak-otak, pempek)</li> <li>- pengasapan (jenis produksi ikan asap)</li> <li>- pengolahan ikan lainnya (jenis produksi krupuk ikan, krupuk rajungan, olahan rumput laut, popiya krezz, ikan krispy, dendeng ikan, bandeng presto, olahan gurita dan dori, mie kristal, dsb)</li> </ul>	Dinas Perikanan	

### XXXI. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul dan pengembangan ekonomi kreatif	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor perdagangan	Persentase pasar yang layak	Jumlah pasar yang layak dibagi jumlah pasar x 100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2	Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah baru	Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n- Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) -- -----Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 x 100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

**XXXII. KECAMATAN**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Terwujudnya implementasi teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan bagi masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan .....	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN) .....	Kepuasan masyarakat dari hasil perhitungan survei indeks kepuasan masyarakat setiap tahun pada saat layanan kecamatan (PATEN)	Kecamatan	
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	Keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan melalui musrenbang, siskamling	Kecamatan	

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA